

# **EFEKTIFITAS BIDANG PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR**

**Oleh:**

**Muhammad Amri**

**Dosen Pembimbing: Mayarni, S.Sos, M.Si**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Panam, Pekanbaru 28293, Telp/fax (0761) 63277

## ***Abstract***

*The Basic Education Sector at the Education and Culture Office of Kampar regency has the main duty to assist the head of the office in organizing curriculum and student activities, basic education and basic education infrastructure in the work environment of Kampar Education and Culture Office. The purpose of Basic Education in the Department of Education and Culture Kampar regency, the management of educational units at the level of primary school education, and First and Secondary Schools public and private equivalent so as to improve the quality of education and public access to adequate education services, Equitable, and affordable.*

*The method used in this research is descriptive qualitative method, that is describing or explaining the existing problem by giving answer to the problem presented, referring to the theory concerned with the problem. The data collecting used in this research is interview, observation, and documentation study. Then, after all the information required in this study collected, then drawn conclusions.*

*The results of the research show that for the achievement of the objectives in the Basic Education Sector, the strategy used only focuses on the mandate of duty which has been written in juridical. The process of analysis and policy formulation, and education needs planners have not involved educational units (schools) directly, or not yet integrated (integrated). Factors affecting the effectiveness of Basic Education Sector, including low coordination with education unit (school) is insidental (if needed), human resource capacity (employee) Basic Education Field which do not conduct study / scale priority of education requirement in unit Basic education, and inadequate facilities and technology thasana with the implementation of computerized system in the implementation of administrative service tasks.*

**Keywords:** *Effectiveness, Organization, Educational Management, Basic Education.*

## PENDAHULUAN

Sistem pendidikan di Indonesia secara formal diarahkan pada tercapainya cita-cita pendidikan yang ideal dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta berkepribadian yang mantap, mandiri, rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Bab IV Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa: “*Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum*”. Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan

yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten atau kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan pelayanan dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan antara pemerintahan pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/ kota menurut **Akhmad Sudrajat** dalam era desentralisasi pendidikan dapat dilihat dalam matriks di bawah ini :

**Tabel 1**  
**Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan**

Sub Urusan	Pemerintahan Pusat	Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota
Manajemen Pendidikan	Penetapan standar nasional pendidikan. Pengelolaan Pendidikan Tinggi	Pengelolaan pendidikan menengah. Pengelolaan pendidikan khusus	Pengelolaan pendidikan dasar. Pengelolaan pendidikan usia dini dan pendidikan non formal
Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan	–	–

	dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik dan tenaga pendidikan lintas daerah provinsi, dan pengembangan karier pendidik.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/ kota.
Perizinan Pendidikan	Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.  Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.	Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.  Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.	Rekomendasi penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.  Rekomendasi penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 2 disebutkan bahwa pengelolaan pendidikan dilakukan oleh; pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan atau program pendidikan. Dalam melakukan pengelolaan pendidikan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara nasional.

Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah daerah, (Pasal 3, PP. Nomor 17 Tahun 2010) bertujuan untuk menjamin :

- a. Akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau.
- b. Mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat.
- c. Efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Dalam kerangka ini, pengelolaan pendidikan oleh pemerintah kabupaten/ kota dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan kabupaten/ kota dalam melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pengembangan mutu pendidikan yang komprehensif, yang didukung dengan data dan informasi yang akurat, lengkap, aktual dan relevan, sehingga diharapkan problematika pendidikan di setiap jenjang pendidikan dapat ditanggulangi secara efektif dan

efisien dengan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di tingkat kabupaten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar mengusung Visi, yaitu "Mewujudkan Pendidikan Yang Aspiratif, Berkualitas Dan Mandiri Tahun 2025". Dari visi di atas dirumuskan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar adalah:

1. Mewujudkan pelayanan prima, baik internal organisasi maupun pelayanan publik
2. Mewujudkan akses pendidikan merata dan bermutu disemua jenjang dan jenis pendidikan.
3. Mewujudkan insan pendidikan yang berakhlak dan bermoral, bermutu dan berdaya saing pendidikan.
4. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.
5. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.

Berdasarkan kebijakan daerah Kabupaten Kampar terutama di bidang pendidikan dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, yaitu dengan tugas dinas pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Kampar, bidang pendidikan dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam,

menyelenggarakan kegiatan kurikulum, kesiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana pendidikan dasar dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini mengandalkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala Seksi/ Pegawai Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, dan guru atau kepala sekolah pada satuan Pendidikan Dasar. Kemudian observasi untuk melihat dan menganalisa kejadian-kejadian dilapangan, selanjutnya dengan menghubungkan wawancara, data atau laporan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

## **HASIL**

### **A. Efektifitas Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.**

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang atau organisasi menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan, atau dapat diartikan, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan

yang direncanakan atau ditetapkan. Efektifitas dapat diartikan sebagai tingkat atau derajat pencapaian hasil kerja yang diharapkan. (Sumaryadi, 2005: 105).

Efektifitas Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar adalah seberapa baik tugas yang dilakukan oleh Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kampar pada wilayah kerja dan kewenangan yang dijalankan sesuai dengan tugas-tugas yang telah diatur atau sejauh mana intansi tersebut menghasilkan keluaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dapat diartikan, apabila suatu sasaran kerja organisasi dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

### 1) Kejelasan Tujuan Yang Hendak Dicapai

Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah daerah (Pasal 3, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010) bertujuan untuk menjamin; a) Akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau, b) Mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat, c) Efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Sesuai tugasnya kejelasan tujuan yang hendak dicapai Bidang Pendidikan Dasar, memiliki tujuan yang jelas yaitu, pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan SD dan SLTP negeri dan swasta

sederajat dalam mewujudkan akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang bermutu, mencukupi, merata, dan terjangkau pada jenjang pendidikan SD dan SLTP baik negeri maupun swasta.

### 2) Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan.

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan. Ada 3 (tiga) hal menurut Tangkilisan (2005) yang selalu menjadi perhatian dalam setiap merumuskan suatu strategi secara efektif adalah sebagai berikut :

- a) Mandat merupakan suatu keharusan yang memiliki landasan hukum, yang secara formal yuridis harus dilaksanakan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Secara organisatoris mandat meliputi berbagai kewajiban, tugas, fungsi yang harus dilakukan oleh organisasi.
- b) Visi adalah gambaran atau kondisi masa depan yang masih abstrak, tetapi merupakan konsepsi yang dapat dibaca oleh setiap orang, ini berarti visi merupakan suatu pikiran yang melampaui realitas sekarang, suatu keadaan yang diciptakan, yang belum pernah ada sebelumnya dan akan diwujudkan oleh anggota organisasi.
- c) Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh suatu instansi atau organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau ditetapkan. Misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diungkapkan

dalam bentuk output dan pelayanan yang optimal untuk memenuhi tuntutan, kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Kejelasan strategi pencapaian tujuan, bahwa untuk pencapaian tujuan Bidang Pendidikan Dasar menjalankan strategi hanya terfokus pada mandat tugas yang telah tertulis secara yuridis dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2012. Secara khusus, seperti perkembangan teknologi di era modern dan inovasi dibidang pelayanan (seperti, penggunaan website dan sistem informasi terpadu/terintegrasi dengan satuan pendidikan maupun pelaksana teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum ada/ berjalan).

### 3) **Proses Analisis Kebutuhan dan Perumusan Kebijakan**

Pada tahapan perumusan kebijakan pendidikan, sebagai penyempurnaan dari tahapan implementasinya kebijakan pendidikan menghadapi beberapa permasalahan yang dihadapi. Secara konseptual, masalah atau problematika didefenisikan sebagai gap atau kesenjangan yang ditemukan antara *das sollen* (konsep ideal) dan *des sein* (kenyataan yang terjadi dilapangan). Problematika ini harus diidentifikasi sehingga bisa membentuk formulasi yang tepat. Langkah dalam identifikasi ini bisa dilakukan dengan menganalisa terhadap informasi, melakukan pengamatan secara langsung, melakukan survey, ataupun identifikasi masalah dalam perumusan kebijakan bisa didasarkan pada laporan-laporan yang diterima terkait dengan pelaksanaan pendidikan (Jahari dan Syarbini, 2013:130)

Proses analisis dan perumusan kebijakan yang dilaksanakan Bidang

Pendidikan Dasar belum berjalan efektif, dimana proses analisa kebutuhan Bidang Pendidikan Dasar (kebutuhan kurikulum muatan dalam perumusan kebijakannya tidak melibatkan aspirasi satuan pendidikan dasar (sekolah). Selain itu, identifikasi analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan hanya didasarkan pada laporan-laporan tertulis dari satuan pendidikan.

### 4) **Perencanaan Yang Matang**

Menurut Ramayulis (2008:271), secara lebih spesifik dalam konteks manajemen pendidikan, perencanaan meliputi penentuan prioritas agar pelaksanaan pendidikan berjalan secara efektif, prioritas kebutuhan agar melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam proses pendidikan, masyarakat bahkan murid.

Perencanaan kebutuhan pendidikan dengan sasaran satuan pendidikan (SD dan SLTP negeri dan swasta sederajat), belum optimal atau matang dilakukan dimana proses perencanaan kebutuhan pendidikan belum melibatkan satuan pendidikan (sekolah) secara langsung, atau belum terintegral (terpadu) secara matang bagi skala prioritas perencanaan kebutuhan pendidikan bagi satuan pendidikan.

### 5) **Penyusunan Program Yang Tepat**

Penyusunan program yang tepat mengacu dan berorientasi kepada tujuan dan misi dari pendidikan terutama misi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan kegiatan kurikulum, kesiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana pendidikan dasar

dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

Penyusunan program atau kegiatan Bidang Pendidikan Dasar berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok Bidang Pendidikan Dasar, dalam pelaksanaannya memiliki poin tugas yang dirinci dan disusun dalam ketetapan tugas (Perbup Kampar Nomor 55 tahun 2012) yang dibagi secara umum dalam 3 (tiga) seksi untuk menyelenggarakan program dibidang pendidikan dasar, yaitu seksi kurikulum dan kesiswaan pendidikan dasar, seksi ketenagaan pendidikan dasar, dan seksi sarana dan prasarana pendidikan dasar, dengan sasaran satuan pendidikan yang menjadi ruang lingkup kerja Bidang Pendidikan Dasar.

#### **6) Ketersediaan Sarana dan Prasarana**

Secara sederhana, sarana didefinisikan sebagai perangkat, peralatan, bahan yang digunakan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Menurut **Mulyasa (2006;157)**, bahwa yang dimaksud sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan menunjang proses pendidikan, khususnya alat-alat dan media yang digunakan Bidang Pendidikan Dasar dalam mengumpulkan informasi dan menganalisa ketersediaan sarana dan prasarana proses belajar mengajar di satuan pendidikan.

Berdasarkan Pengamatan dan hasil wawancara diatas terdapat beberapa kekurangan dalam ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas yang dapat diuraikan sebagai berikut;

- Peralatan administrasi yang masih kurang misalnya tempat

penyimpanan arsip sehingga mengakibatkan arsip-arsip tidak tertata dengan baik dan tentunya hal ini akan mengakibatkan lambatnya proses pencarian kembali arsip tersebut ketika diperlukan.

- Teknologi yang digunakan dalam menjalankan tugas belum sepenuhnya di dukung atau menggunakan sistem komputerisasi.

Dalam mendukung efektifitas Bidang Pendidikan Dasar, salah satunya adalah pengelolaan sarana dan prasarana dalam mendukung proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dasar, maka Bidang Pendidikan Dasar pada dasar memiliki tugas menghimpun, menginventarisasi kebutuhan, dan memberikan laporan atau usulan kepada kepala dinas untuk kebutuhan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Ketersediaan prasarana dan sarana pada Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam mendukung tugas Bidang Pendidikan Dasar belum efektif, dimana proses kebutuhan dan dalam menganalisa perumusan kebijakan hanya didasarkan pada laporan-laporan tertulis dari satuan pendidikan. Ketersedian sarana dan prasarana, seperti peralatan administrasi yang masih kurang, misalnya tempat penyimpanan arsip sehingga mengakibatkan arsip-arsip tidak tertata dengan baik dan tentunya hal ini akan mengakibatkan lambatnya proses pencarian kembali arsip tersebut ketika diperlukan, serta teknologi informasi yang digunakan belum di dukung atau menggunakan sistem komputerisasi yang terintegrasi

yang mengakibatkan rendahnya dan kurang cepatnya informasi yang dibutuhkan ataupun disampaikan diterima oleh pihak-pihak terkait (satuan pendidikan maupun Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).

#### **7) Sistem Pengawasan dan Pengendalian**

Pengawasan berguna untuk memastikan suatu kegiatan atau program yang diencanakan, digerakkan, dilaksanakan dan dibiayai dengan baik. Menurut **Fattah (2006:66)** mengatakan secara sederhana proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan, yaitu memantau (*monitoring*), menilai dan melaporkan.

Berdasarkan hasil penelitian, pengendalian yang dilakukan oleh Bidang Pendidikan Dasar secara tidak langsung, yaitu melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Kampar, terkait pengadaan sarana prasarana pendukung dalam pengelolaan sarana prasarana pendidikan di satuan pendidikan belum efektif, dimana belum meratanya sarana dan prasarana dalam mendukung mutu proses belajar mengajar. Bantuan sarana dan prasarana sekolah yang dekat dengan pusat kecamatan lebih maju di bandingkan dengan sekolah yang jauh dari pusat kecamatan/ kurang mendapat perhatian dan lebih menuntut peran aktif satuan pendidikan dalam meminta rekomendasi pengajuan dana bantuan atau sarana lainnya yang akan diajukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tingkat kabupaten. Atau dengan kata lain, terhadap pengendalian maupun pengadaan sarana dan prasana lebih diutamakan peran aktif satuan pendidikan dalam mengajukan

kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan tanpa ada atau kurangnya pengawasan secara langsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan atau survey kebutuhan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan.

Sistem pengawasan serta pengendalian yang dilakukan oleh Bidang Pendidikan Dasar masih bersifat tidak langsung, yaitu masih bergantung pada satuan pendidikan dan Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di setiap kecamatan. Dimana menuntut peran aktif satuan pendidikan dalam pengajuan dana bantuan atau sarana lainnya yang akan diajukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tingkat kabupaten. atau kurangnya pengawasan secara langsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan atau survey kebutuhan pendidikan, sarana dan prasarana pada satuan pendidikan dasar sebagai sasaran tugas dari Bidang Pendidikan Dasar tersebut.

#### **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanan Fungsi UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tapung Hilir.**

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam menjalankan tugas yang telah ditetapkan meliputi; rendahnya koordinasi yang dilakukan dengan satuan pendidikan (sekolah) bersifat insidental (apabila diperlukan), kemampuan sumber daya manusia (pegawai) Bidang Pendidikan Dasar yang tidak melakukan telaah/ kajian

skala prioritas kebutuhan pendidikan pada satuan pendidikan dasar, seperti bantuan sarana dan prasarana bergantung pada satuan pendidikan sendiri tanpa mempertimbangkan satuan pendidikan mana yang lebih membutuhkan bantuan pendidikan. Faktor lainnya, belum memadainya sarana prasana dan teknologi dengan penerapan sistem komputerisasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan administrasi (tidak dapat diakses secara langsung/ online terhadap suatu informasi yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan), penyampaian informasi, pendataan, inventarisasi dan pengambilan keputusan berdasarkan analisa data. (tidak dapat diakses secara langsung/ online terhadap suatu informasi yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan).

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektifitas Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar bahwa untuk pencapaian tujuan Bidang Pendidikan Dasar menjalankan strategi hanya terfokus pada mandat tugas yang telah tertulis secara yuridis dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2012. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang dilaksanakan Bidang Pendidikan Dasar belum berjalan efektif, dimana proses analisa kebutuhan Bidang Pendidikan Dasar (kebutuhan kurikulum muatan dalam perumusan kebijakannya tidak melibatkan aspirasi satuan pendidikan dasar (sekolah). Perencanaan kebutuhan pendidikan belum melibatkan satuan pendidikan (sekolah) secara langsung, atau belum terintegral (terpadu) secara matang bagi skala prioritas perencanaan

kebutuhan pendidikan bagi satuan pendidikan. Ketersediaan sarana dan prasarana, seperti peralatan administrasi yang masih kurang, misalnya tempat penyimpanan arsip sehingga mengakibatkan arsip-arsip tidak tertata dengan baik, dan Sistem pengawasan serta pengendalian yang dilakukan oleh Bidang Pendidikan Dasar masih bersifat tidak langsung.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, et. El. Ahli bahasa Agus maulana, 1992, *Sistem Pengendalian Manajemen*. Penerbit Bina Rupa Aksara. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Edisi Pertama. Kencana Preneda Media Group. Jakarta.
- Fattah, Nanang. 2006. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Handoko, T. Hani. 2001. *Menejemen Personalia dan Sumber daya Manusia*. BPFE. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Menejemen*. BPFE. Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Indrawijaya. 2000. *Perilaku Organisasi*. Sinar Baru. Bandung.
- Jahari J, Syarbini. A. 2013. *Manajemen Madrasah (Teori, Strategi dan Implementasi)*. Alfabeta. Bandung.

- Lubis, S.B Hari. 1998. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial UI, Jakarta.
- Mulyasa, Encu. 2006. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Rosda Karya. Bandung.
- Moleong J Lexi, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Makmur. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektifitas Organisasi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ramayulis. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam (Mengatasi Masalah Pendidikan Islam di Indonesia)*. Kalam Mulya. Jakarta.
- Robbins, P. Stephen. 2003. *Perilaku Organisasi*. PT Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Manajemen (Edisi Ketujuh, Jilid Kesatu)*. PT. Indeks Grup Gramedia. Jakarta.
- Siagian, S.P. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Steers. Richard M. 1995. *Efektivitas Organisasi*. Erlangga. Jakarta.
- Suharsimi, Arikunto. 2007. *Evaluasi Program Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta. Citra Utama.
- Sutrisno, H.E. 2007. *Budaya Organisasi*. Kencana Pranadamedia Group. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Tangkilisan, H.N. 2005. *Manajemen Publik*. Grasindo. Jakarta.
- Umar, Husein, 2001, *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

#### **Dokumen :**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan.
- Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Kampar.